



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTIASIH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 728800

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.417.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 364.000.000
2. Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 122.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.343 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 937.200.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 969 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 484.500.000
5. Tanah Seluas 1.009 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 403.600.000
6. Tanah Seluas 354 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 106.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **116.500.000**

1. MOBIL, HONDA CRV RE12WD 2.0 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.594.000.000
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.444.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.